

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil analisa dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi masyarakat yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan sebuah program adalah bentuk partisipasi aktif dan sebaiknya dilakukan komunikasi dua arah di semua tahapan program antara pemerintah dan masyarakat.
2. Tingkat partisipasi masyarakat sangat bergantung dari dukungan dan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan masyarakat dalam membangun lingkungan mereka. Jika pemerintah memberi kebebasan pada masyarakat untuk membuat inisiatif sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan maka tingkat partisipasi partnership dan self mobilization dapat terjadi. Namun, jika masih terdapat kontrol dari pemerintah maka tingkat partisipasi yang akan terjadi adalah tingkat consiliation. Sementara jika kontrol dipegang penuh oleh pemerintah maka yang terjadi adalah tingkat partisipasi informing dan information gathering. Pada tingkat consultation sendiri kontrol masih dipegang penuh oleh pemerintah namun masyarakat sudah mulai diajak berdiskusi dan dimintai pendapat tetapi keputusan akhir masih berada di tangan pemerintah.

| Tingkat Partisipasi | Pendekatan |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Informing | Not Supportive Government |
| 2. Informastion gathering | |
| 3. Consultation | Not-so-Supportive Government |
| 4. Consiliation | Supportive Government |
| 5. Partnership | |
| 6. Self mobilization | |

Sumber: Analisa penulis, 2017.

3. Kinerja yang diharapkan dan diperlukan dalam menunjang pelaksanaan program yaitu ketika semua indikator kinerja yang ditentukan berada pada kuadran B pada metode IPA dimana indikator-indikator yang ada dianggap penting oleh masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya program relatif tinggi. Dalam hal ini indikator-indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek-aspek berikut: rencana kerja KPM, penyelenggaraan rapat mingguan, pengawasan dalam hal pembiayaan, pelaporan yang dibuat oleh P3A, pengaturan tenaga kerja, dan pengendalian waktu/jadwal pekerjaan kerja.
4. Implementasi program P4 ISDA IK secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep/prinsip dasar P4 ISDA IK. Namun dengan beberapa point peningkatan yang masih perlu dilakukan dalam pelaksanaannya seperti peran aktif masyarakat dan monitoring program

5.2. Rekomendasi

Dari hasil analisa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan rekomendasi yang berupa usulan bagi pelaksanaan P4 ISDA IK selanjutnya, yaitu:

1. Sesuai dengan maksud dari program ini sendiri yaitu untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan mengingat pemberian bantuan berdasarkan skala desa maka perlu dibuatnya skala prioritas dalam pemberian dana bantuan dimana perlu ditentukan kriteria-kriteria desa miskin seperti apa yang akan mendapatkan prioritas dana bantuan terlebih dahulu karena mengingat keterbatasan dana yang ada setiap tahunnya. Namun akan lebih baik lagi jika kriteria prioritas penerimaan dana bantuan adalah berdasarkan tingkat kerusakan dari irigasi itu sendiri sehingga akan lebih memudahkan dalam penentuan kelompok penerima manfaat dari program.
2. Perlu dibuatnya sket lokasi dan desain sederhana pembangunan irigasi kecil sehingga memudahkan dalam monitoring pelaksanaan program karena jika melihat dari kasus Desa Kalisari dalam pelaksanaannya tidak terdapat sket lokasi dan desain sederhana dari pembangunan irigasi kecil yang dilakukan

sementara hal tersebut merupakan salah satu hal penting yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan program dan penting untuk dilakukan.

3. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi diperlukan keterbukaan dalam setiap aspek dan tahap perencanaan untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dalam proses pelaksanaan P4 ISDA IK, pemberian informasi pengumuman kepada masyarakat tentang pelaksanaan program, hendaknya dapat dilakukan melalui sarana media cetak dan elektronik disamping lewat forum pertemuan. Dengan cara melakukan pengumuman melalui media cetak, elektronik, dan forum pertemuan, hendaknya sifat pelibatan masyarakat bukan lagi atas dasar inisiatif pemerintah semata tetapi ditingkatkan lagi menjadi partisipasi dengan inisiatif dari masyarakat sendiri.
4. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana irigasi melalui Program P4 ISDA IK, dapat dilakukan lewat peningkatan pembinaan melalui penyuluhan, dan pemerintah perlu berinisiatif untuk meningkatkan kualitas seluruh stakeholder dalam setiap tahap pembangunan, karena dengan kualitas yang setara diantara para stakeholder akan menghindari konflik karena kepentingan individu maupun golongan.
5. Pemerintah perlu merangsang dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengingat merekalah yang pada akhirnya akan mengoperasikan dan memelihara hasil dari program kedepannya. Diharapkan dengan diberikannya kepercayaan lebih kepada masyarakat maka masyarakat akan lebih mempunyai rasa memiliki terhadap apa yang telah mereka laksanakan.
6. Untuk meningkatkan kinerja dari P3A perlu ditingkatkannya pembinaan dan pelatihan tentang manajemen organisasi guna meningkatkan pemahaman dari masyarakat tani mengenai pentingnya P3A mempunyai rencana kerja KPM, P3A menyelenggarakan rapat mingguan, pengawasan dalam hal pembiayaan, pelaporan yang dibuat oleh P3A, pengaturan tenaga kerja, pengendalian waktu/jadwal pekerjaan kerja. Karena keenam hal ini masih dianggap remeh atau tidak penting oleh sebagian besar dari anggota masyarakat tani.

7. Sedangkan bagi pengembangan studi lanjutan yang berkaitan dengan hasil penelitian, maka perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam, mengenai seberapa besar dampak dari pelaksanaan P4 ISDA baik dampak secara financial maupun sosial di masyarakat penerima bantuan sosial P4 ISDA IK.